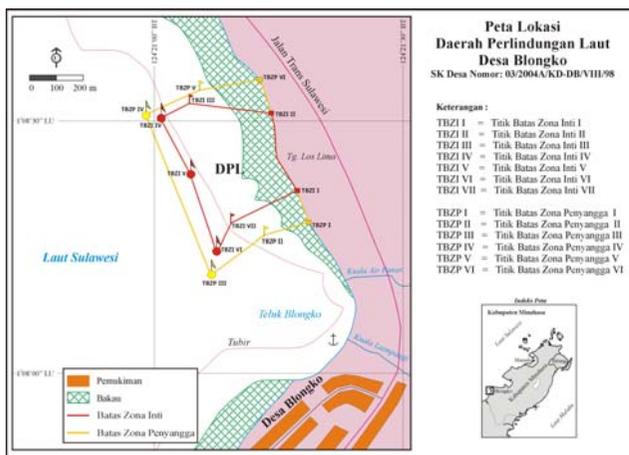


# PANDUAN MENGEVALUASI PENGELOLAAN DAERAH PERLINDUNGAN LAUT YANG EFEKTIF



Joke Mewengkang  
Ismail Tampi  
James Koagouw



## Daftar Isi

<b>KATA PENGANTAR</b>	i
<b>DAFTAR ISI</b>	iii
<b>PENGELOLAAN DPL YANG EFEKTIF</b>	1
<b>1. PERSIAPAN</b>	2
Langkah 1.1 Rapat di Lokasi DPL	2
Langkah 1.2 Penentuan Para Pihak	2
Langkah 1.3 Training of Trainers (ToT)	3
Langkah 1.4 Rapat Perencanaan Kegiatan	4
<b>2. SELEKSI INDIKATOR</b>	5
Langkah 2.1 Identifikasi Maksud dan Tujuan Pengelolaan DPL	5
Langkah 2.2 Penentuan indikator yang relevan	5
Langkah 2.3 Membuat Prioritas Indikator	8
Langkah 2.4 identifikasi metode penanganan pengukuran tiap indikator	9
Langkah 2.5 Penentuan Indikator yang akan diukur	10
<b>3 MONITORING DAN EVALUASI</b>	
Langkah 3.1 Pembagian Peran di Lapangan	11
Langkah 3.2 Pengumpulan Data	11
Langkah 3.3 Pengolahan Data	11
Langkah 3.4 Analisa Data	12
Langkah 3.5 Dokumentasi Data	12
	12
<b>4. KOMUNIKASI HASIL EVALUASI</b>	
Langkah 4.1 Diskusi Hasil Evaluasi	13
Langkah 4.2 Strategi Pengelolaan Berdasarkan Hasil	13
<b>PENDEKATAN PENGELOLAAN DPL YANG EFEKTIF</b>	14

## **KATA PENGANTAR**

Di Sulawesi Utara saat ini telah ada 26 Daerah Perlindungan Laut (DPL) yang mencakup luas 1000 hektar dan 5 Daerah Perlindungan Mangrove (DPM). Pembuatan DPL-DPL itu menggunakan pendekatan berbasis masyarakat dimana masyarakat dilibatkan mulai dari penggalian isu, perencanaan, adopsi formal/pendanaan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi, sehingga masyarakat turut merasa memiliki DPL-DPL itu.

DPL yang ada di Sulawesi Utara mulai dibentuk sejak tahun 1998 ketika dilaksanakan proyek pengelolaan sumberdaya pesisir (Coastal Resources Management Project/CRMP) yaitu suatu proyek kerjasama antara USAID dan Pemerintah Indonesia lewat BAPENAS. Dari proyek ini boleh dihasilkan DPL Blongko yang juga merupakan DPL pertama di Indonesia diikuti DPL di Talise, Tumbak dan Bentenan. Proyek ini terus berlanjut sampai tahun 2003 sehingga melalui proyek ini dapat dihasilkan 23 DPL. DPL lain dikembangkan oleh JICA (2 DPL) dan CRM (1 DPL) yang pendekatan pembuatannya diadopsi dari CRMP.

Seiring dengan perjalanan waktu, pengelolaan DPL juga turut berubah dari pengelolaan yang aktif menjadi kurang aktif, tidak aktif bahkan ada yang hamper mati. Hal ini nyata dimana beberapa ada beberapa DPL yang tanda batasnya tidak terpelihara lagi sehingga ada ada tanda batas yang hilang bahkan beberapa DPL tidak memiliki lagi tanda batas. Demikian pula dengan kelompok pengelola DPL, banyak yang sudah tidak aktif anggotanya bahkan beberapa Kelompok Pengelola Daerah Perlindungan Laut (KP-DPL) sudah tidak berkegiatan lagi. Jika hal ini terus terjadi maka sebagian besar DPL-DPL yang ada akan mati sebelum tahun 2009 – tahun dimana akan dilaksanakan World Ocean Summit - ataupun tahun 2012 yang berdasarkan World Summit tahun 2002 direncanakan sebagai tahun telah berlakunya hukum internasional tentang DPL dan telah terbentuknya jaringan antar DPL-DPL di dunia (Pomeroy et al., 2004).

Salah satu cara untuk menghindari kematian DPL yang telah dibuat dengan pengorbanan yang tinggi baik dari aspek dana, tenaga dan pikiran, kita perlu mengetahui apa yang dihasilkan oleh DPL-DPL itu. Kadang masyarakat hanya menilai apa yang dihasilkan oleh DPL-DPL itu melalui uang yang dipeoleh dari kontribusi wisata ke DPL, padahal itu hanyalah salah satu aspek.

DPL itu seperti Bank yang jika dipelihara dengan baik, aspek biologi sumberdaya pesisir di DPL akan memberi pengaruh baik pada kesejahteraan masyarakat, pendapatan dan keamanan pangan bagi masyarakat baik masyarakat yang memanfaatkan langsung, misalnya nelayan maupun yang tergantung pada sumberdaya pesisir.

Untuk mengetahui sejauh mana yang telah dihasilkan DPL maka SCREEN bersama CRC-URI (Amerika Serikat) dan LSU (Philipina) telah melakukan proyek percontohan untuk menguji keefektifan pengelolaan 4 DPL di Indonesia dan Philipina, dimana untuk Indonesia 2 lokasi yang dipilih yaitu DPL Blongko dan DPL Serei yang terletak di Propinsi Sulawesi Utara. Proyek ini melalui 5 tahapan yaitu :

1. Persiapan lokasi DPL percontohan
2. Training of Trainers (ToT) tentang metode monitoring dan evaluasi DPL
3. Penilaian DPL contoh berdasarkan metode yang dibangun dalam ToT
4. Lokakarya regional untuk mengkomunikasikan hasil penilaian DPL contoh
5. Pembuatan buku panduan

Dengan buku panduan ini diharapkan dapat dipergunakan di DPL-DPL yang ada karena buku panduan ini telah diujicoba dan metode yang ada dibuat supaya manager-manager DPL tidak terlalu menemui hambatan baik saat perencanaan, pengumpulan data, pengolahan data dan analisa data sehingga hasilnya dapat dikomunikasikan kepada masyarakat, pemerintah dan stakeholder.

**Joke Mewengkang**  
**Community Development Specialist SCREEN**

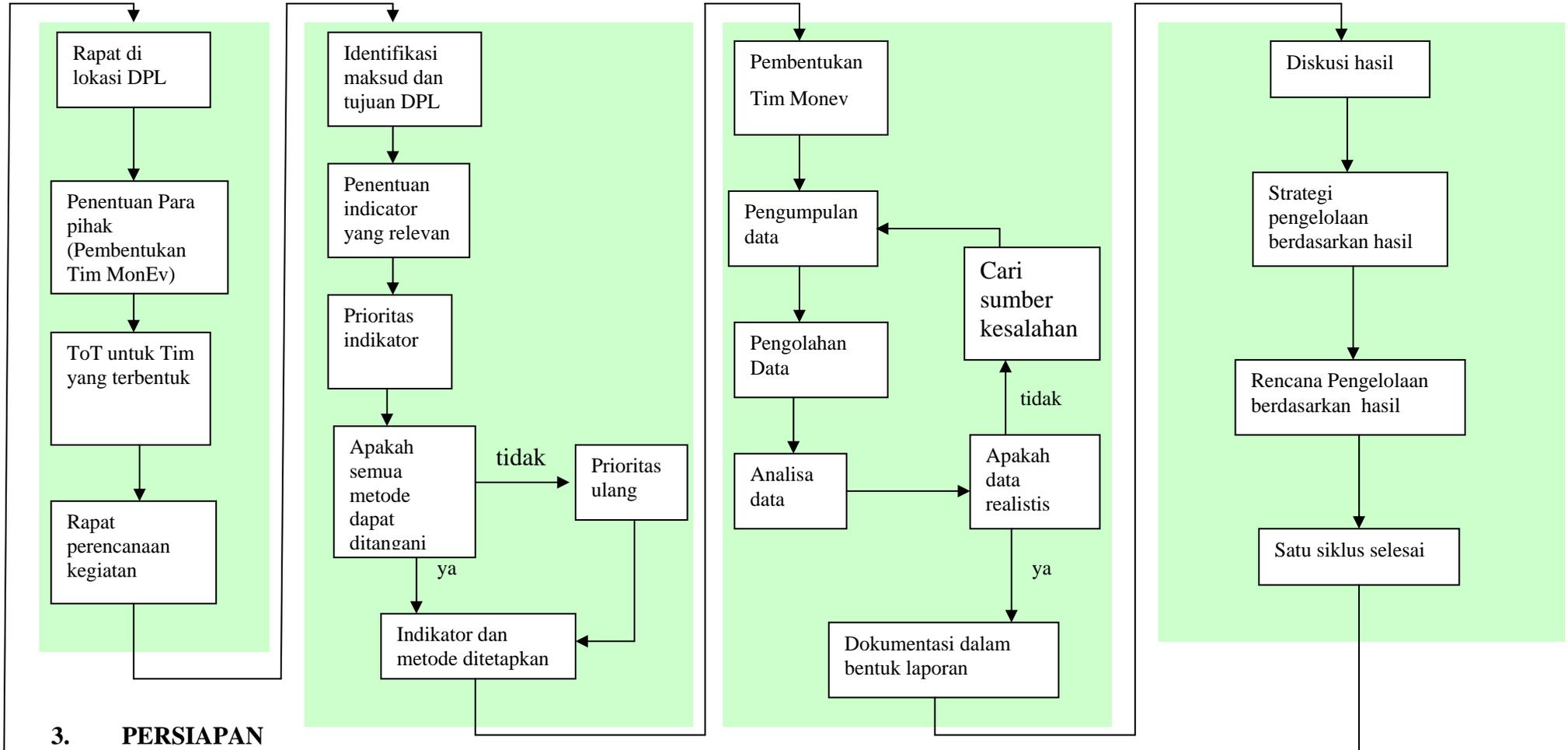
## PENGELOLAAN DPL YANG EFEKTIF

### Langkah 1. Persiapan

### Langkah 2. Seleksi Indikator

### Langkah 3. Penilaian Lapangan

### Langkah 4. Komunikasi Hasil dan Adaptasi Rencana Pengelolaan



### **Langkah 1.1 Rapat di Lokasi DPL**

Rapat sangat penting untuk dilakukan dengan tujuan untuk mengkomunikasikan kegiatan. Rapat dihadiri oleh KP-DPL, Pemerintah, Masyarakat, Nelayan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Universitas dan LSM.

Dalam rapat awal ini perlu untuk disosialisasikan tentang apa yang diketahui tentang perkembangan DPL, misalnya perkembangan tutupan karang, jumlah ikan, perkembangan kesejahteraan masyarakat, pendapatan masyarakat, pengetahuan masyarakat tentang DPL, kepedulian masyarakat, pengetahuan masyarakat tentang DPL, ketaatan masyarakat pada aturan tentang DPL, dan lain-lain.

### **Langkah 1.2 Penentuan Para Pihak**

Penentuan siapa-siapa yang akan dilibatkan dalam kegiatan ini dapat ditentukan langsung melalui rapat awal diatas. Para pihak yang terlibat akan diberikan tanggung jawab dan dilatih menggunakan metode monitoring lewat ToT. Agar tertib harus dibuat aturan main untuk tiap pihak yang terlibat dalam kegiatan.



Tabel aturan main para pihak

No	Pihak yang terlibat	Tingkat keterlibatan	Yang akan dilakukan	Metode untuk mengkomunikasikan hasil	Tindak lanjut dari hasil
1	Kelompok Pengelola DPL	Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Organisir dan melakukan monitoring</li> <li>• Mengirim data</li> <li>• Melaporkan hasil ke desa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Poster</li> <li>• Percakapan</li> <li>• pertemuan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjalankan strategi yang dihasilkan</li> <li>• Membuat proposal</li> </ul>
2	Pemerintah Desa	Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengorganisir pertemuan desa</li> <li>• Bertanggung jawab akan kegiatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat Desa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerima laporan hasil untuk dibuat rencana desa</li> </ul>
3	Masyarakat	Sedang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan monitoring</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Percakapan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjalankan strategi yang dihasilkan</li> </ul>
4	Dinas Perikanan dan Kelautan	Sedang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengetahui kegiatan dan menerima laporan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komunikasi hasil ke para pihak</li> </ul>
5	Universitas	Sedang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bantuan Tehnis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bahan pembelajaran</li> </ul>
6	LSM	Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendampingan</li> <li>• Bantuan teknis</li> <li>• Melakukan pengumpulan data</li> <li>• Mengolah data</li> <li>• Menganalisa data</li> <li>• Membuat laporan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan Data statistik</li> <li>• Lokakarya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendampingan terhadap KP-DPL dalam pengumpulan dan mengolah data</li> <li>• Perluasan lokasi dampingan</li> </ul>

### Langkah 1.3 Training of Trainers (ToT)

Setelah para pihak yang akan terlibat telah diidentifikasi maka para pihak ini diikutsertakan dalam ToT. ToT ini sebaiknya dilakukan di lokasi yang mudah dijangkau oleh semua pihak dan dekat dengan lokasi yang bisa menjadi tempat studi lapangan untuk metode yang sedang dilatih. Lamanya pelatihan 4-5 hari yaitu 2-3 hari dalam ruangan, 1 hari studi lapangan, 1-2 hari mengolah dan menganalisa data.

Keluaran dari ToT ini adalah kemampuan para pihak untuk menggunakan metode monitoring dan evaluasi yang akan dipergunakan pada saat penilaian di lokasi DPL. Melalui ToT ini para pihak dapat menentukan maksud dan tujuan dari suatu DPL, mengidentifikasi indikator-indikator, cara mengumpulkan data, mengolah data, menganalisa data dan mengkomunikasikan hasil.

#### **Langkah 1.4 Rapat Perencanaan Kegiatan**

Tujuan rapat perencanaan kegiatan ini :

- a. Menentukan tanggal dan agenda kegiatan monitoring dan evaluasi. Dalam menentukan jadwal kegiatan harus memperhatikan kalender musim dari lokasi DPL.
- b. Menentukan alat dan bahan yang akan dipergunakan dan bagaimana pengadaannya serta siapa yang bertanggung jawab menyediakan.
- c. Lokasi kegiatan dan desa yang akan menjadi lokasi kontrol.
- d. Siapa-siapa yang akan berpartisipasi dalam kegiatan monitoring.
- e. Sumberdaya apa yang dibutuhkan dan siapa yang mengadakannya.
- f. Bagaimana data diolah dan dianalisa
- g. Bagaimana cara mengkomunikasikan data

### **4. SELEKSI INDIKATOR**

#### **Langkah 2.1 Identifikasi Maksud dan Tujuan Pengelolaan DPL**

Untuk mengidentifikasi maksud dan tujuan pengelolaan DPL dapat dilihat pada dokumen rencana pengelolaan karena semua DPL yang telah terbentuk memiliki rencana pengelolaan yang berisi visi, misi, strategi dan kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan DPL.

Maksud dan tujuan yang teridentifikasi kemudian dibuat daftar menurut tingkatan prioritasnya. Maksud dan tujuan ini akan menentukan pada penentuan indikator. Maksud dan tujuan dapat dikelompokkan dalam 3 kategori, yaitu; biofisik, sosial-ekonomi, dan kelembagaan.

## Langkah 2.2 Penentuan indikator yang relevan

Indikator adalah suatu unit informasi yang diukur berdasarkan waktu dimana jika didokumentasikan akan terlihat perubahan-perubahannya sebagai bagian dari pengelolaan DPL. Dengan mengukur indikator kita dapat mengetahui tentang :

- a. Keefektifan pengelolaan DPL
- b. Pemahaman kekuatan dan kelemahan pengelolaan DPL
- c. Sejauh mana capaian maksud dan tujuan pengelolaan DPL
- d. Dampak secara langsung dan tidak langsung dari pembuatan DPL terhadap masyarakat.

Contoh-contoh indikator :

### Biofisik

Indikator	metode
1) Tutupan Karang Hidup	Manta tow
2) Populasi ikan di DPL	Fish visual census
3) Populasi ikan tangkapan	CPUE
4) Kelimpahan fokal spesies	Visual sensus
5) Populasi kerang	Survey dan Kuisisioner



### Sosial-ekonomi

Indikator	metode
1) Persepsi ketersediaan pangan ikan laut	kuisisioner
2) Persepsi hasil tangkapan ikan	kuisisioner
3) Material gaya hidup	Survey dan kuisisioner
4) Distribusi sumber pendapatan	kuisisioner
5) Struktur mata pencaharian	kuisisioner
6) Struktur pendidikan masyarakat	kuisisioner



### Kelembagaan

Indikator	metode
1) Tingkat konflik dalam pengelolaan DPL	kuisisioner
2) Keberadaan Kelompok Pengelola DPL	kuisisioner
3) Keberadaan Rencana Pengelolaan DPL	kuisisioner
4) Pemahaman masyarakat tentang aturan DPL	kuisisioner
5) Pelanggaran di DPL	Melihat dokumen
6) Pemasukkan ke KP-DPL	Melihat dokumen

### **Langkah 2.3 Membuat Prioritas Indikator**

Untuk membuat prioritas indikator, indikator yang telah relevan dengan maksud dan tujuan disusun kemudian mengikuti langkah-langkah berikut :

- 1) Memperhatikan daftar indikator yang telah tersusun berdasarkan kategori biofisik, sosial-ekonomi dan kelembagaan
- 2) Apakah semua indikator yang tersusun itu layak untuk diukur
- 3) Penentuan layak atau tidak indikator diukur berdasarkan hubungan antara indikator dan maksud dan tujuan pengelolaan dan hubungan timbal balik antar indikator
- 4) Pemberian nilai tiap indikator dapat dilakukan pada tahapan ini, misalnya :
  - Nilai 3 untuk indikator yang sangat berhubungan dengan maksud dan tujuan
  - Nilai 2 untuk indikator yang berhubungan dengan maksud dan tujuan
  - Nilai 1 untuk indikator hampir tidak berhubungan dengan maksud dan tujuan
  - Nilai 0 untuk indikator yang sama sekali tidak berhubungan dengan maksud dan tujuan
  - Nilai 3 untuk indikator yang memiliki hubungan dengan semua indikator lain yang teridentifikasi
  - Nilai 2 untuk indikator yang memiliki hubungan dengan banyak indikator lain yang teridentifikasi
  - Nilai 1 untuk indikator yang memiliki hubungan dengan beberapa indikator lain yang teridentifikasi
  - Nilai 0 untuk indikator yang samasekali tidak memiliki hubungan dengan indikator lain yang teridentifikasi
- 5) Indikator telah terseleksi

### **Langkah 2.4 identifikasi metode penanganan pengukuran tiap indikator**

Metode penanganan indikator harus memperhatikan :

- Lamanya waktu yang dibutuhkan

- Keterampilan teknis dari pihak-pihak yang terlibat
- Sumberdaya keuangan yang tersedia
- Ketersediaan alat dan bahan

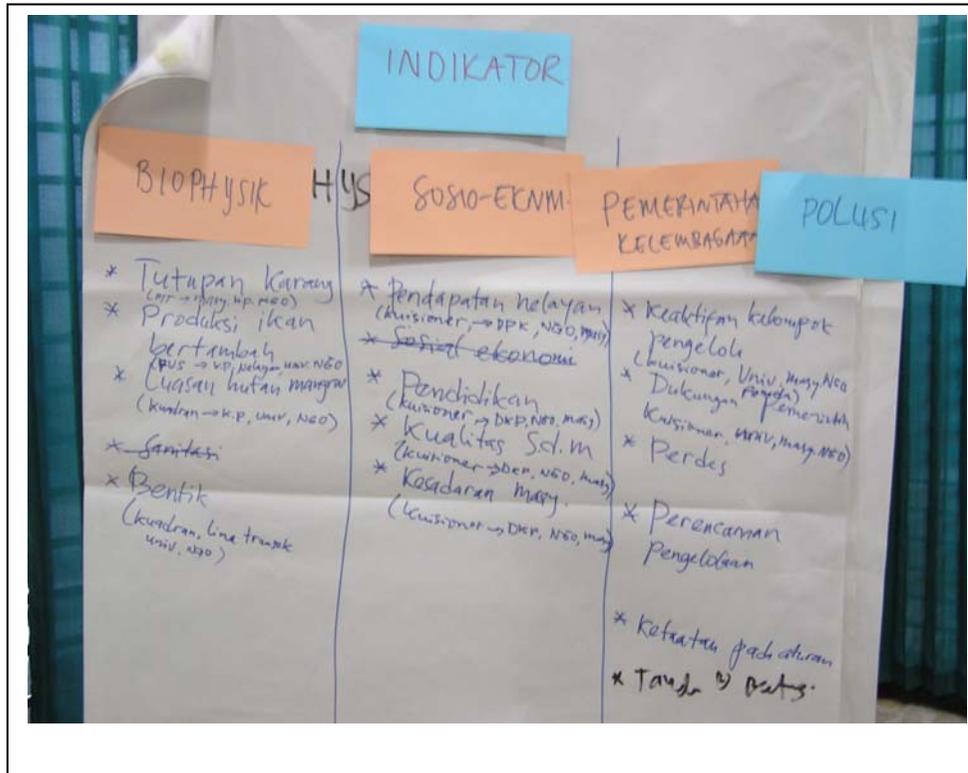
Setelah memperhatikan hal-hal diatas maka kita dapat mengelompokkan metode-metode pengukuran itu menurut :

- 1) Tingkat 1; mudah diukur
- 2) Tingkat 2; hampir mudah diukur
- 3) Tingkat 3; tingkat kesulitan sedang
- 4) Tingkat 4; hampir sulit diukur
- 5) Tingkat 5; sulit diukur

Maksud dari pengelompokan ini agar pada penyusunan jadwal monitoring dan evaluasi dapat disesuaikan dengan kemampuan dan kesiapan para pihak yang terlibat serta ketersediaan sumberdaya yang dibutuhkan.

### **Langkah 2.5 Penentuan Indikator yang akan diukur**

Setelah melalui langkah 2.4 kita akan menghasilkan indikator-indikator yang akan diukur dengan metodologinya, dimana syarat-syarat tiap metode (waktu, keahlian, keuangan, alat dan bahan) dapat dipenuhi.



#### 4 MONITORING DAN EVALUASI

##### Langkah 3.1 Pembagian Peran di Lapangan

Pembagian peran merupakan hal yang sangat strategis pada saat akan memulai penilaian di lapangan karena hal ini dapat memberi pengaruh pada data yang dikumpul. Pihak-pihak yang terlibat dalam penilaian harus memenuhi kualifikasi berpendidikan dan berpengalaman dalam kegiatan monitoring serta harus memahami tentang pengelolaan DPL.

Kelompok Pengelola DPL dan masyarakat setempat dapat diikutsertakan dalam melakukan setiap metode monitoring tetapi tidak bisa mereka sendiri yang menjalankan. Setiap metode yang dijalankan harus ada dari instansi teknis dan/atau universitas dan/atau LSM yang telah berpengalaman sehingga data yang dihasilkan tidak bias.

### **Langkah 3.2 Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan pada 2 lokasi sekaligus yaitu :

- Lokasi 1; di desa yang memiliki DPL
- Lokasi 2; di desa tetangga dari desa yang memiliki DPL

Dalam proses pengumpulan data harus menyesuaikan dengan :

- Kondisi yang disyaratkan dari tiap metode
- Jumlah orang yang terlibat
- Kondisi cuaca pada saat akan dilakukan pengumpulan data
- Kondisi eksternal yang dapat mempengaruhi proses pengumpulan data.

### **Langkah 3.3 Pengolahan Data**

Pengolahan data harus dilakukan oleh lembaga yang memiliki kemampuan dalam pengeolahan data seperti Kantor Dinas Pemerintah, Universitas atau LSM yang berpengalaman. Data yang telah terkumpul diolah menggunakan program-program dalam komputer seperti word, excel, access, GIS, dan lain-lain.

Hasil pengolahan data dibuat dalam bentuk grafik agar mudah dianalisa dan pada saat mengkomunikasikan hasil akan lebih mudah dimengerti oleh penerima.

### **Langkah 3.4 Analisa Data**

Data yang telah diolah perlu dianalisa untuk mengetahui apakah data yang terkumpul realistis. Proses menganalisa data harus dilakukan secara hati-hati. Suatu data harus dibandingkan dan dihubungkan dengan data dan informasi lain yang memiliki hubungan dengan data yang sedang dianalisa.

### **Langkah 3.5 Dokumentasi Data**

Data yang telah dianalisa kemudian didokumentasikan dalam bentuk laporan. Laporan yang dibuat harus disesuaikan dengan target penerima laporan tersebut, misalnya jika laporan itu ditujukan ke instansi teknis dapat dibuat dalam bentuk ilmiah sedangkan jika sasaran penerimanya adalah masyarakat umum maka harus lebih sederhana dan mudah dimengerti tetapi tidak menghilangkan makna dari laporan yang menggambarkan tentang keadaan sebenarnya yang sedang terjadi di DPL.

## **4. KOMUNIKASI HASIL EVALUASI**

### **Langkah 4.1 Diskusi Hasil Evaluasi**

laporan hasil penting untuk didiskusikan untuk:

- Menyebarluaskan hasil monitoring dan evaluasi agar lebih banyak orang yang tahu tentang keadaan sebenarnya dari DPL
- Menindaklanjuti rekomendasi dari laporan hasil

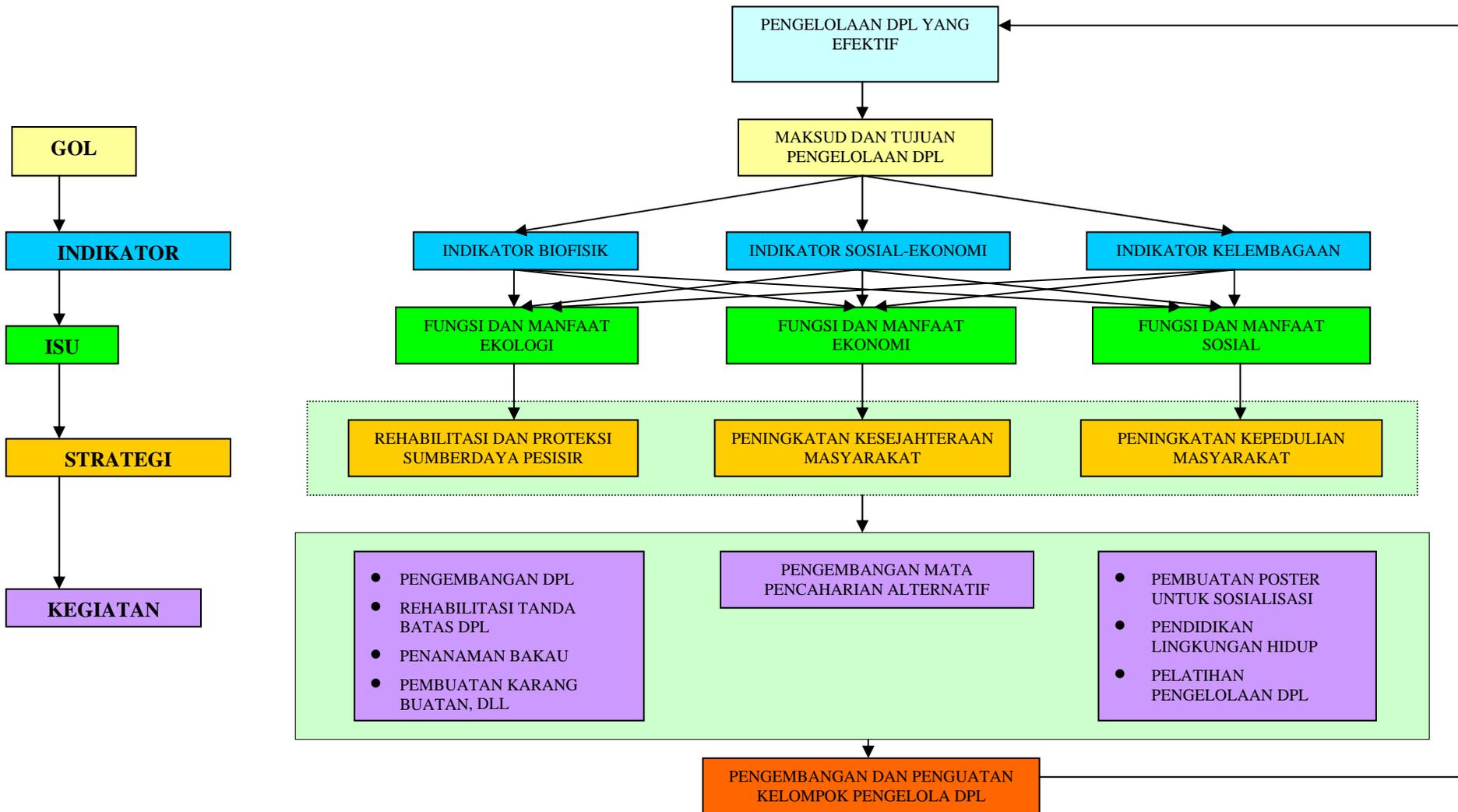
Diskusi dapat dibuat dalam bentuk rapat desa atau melalui seminar yang menghadirkan orang atau lembaga yang mempunyai kaitan kepentingan dengan pengelolaan DPL.

#### **Langkah 4.2 Strategi Pengelolaan Berdasarkan Hasil**

Dari laporan hasil kita dapat mengetahui sejauh mana maksud dan tujuan dari pengelolaan DPL tercapai, sehingga strategi pada dokumen rencana pengelolaan dapat :

- Dilanjutkan jika capaian dari hasil mengarah ke maksud dan tujuan pengelolaan DPL dalam Rencana Pengelolaan
- Diperbaiki jika capaian dari hasil mengarah ke maksud dan tujuan pengelolaan DPL tetapi waktunya lebih lama dari yang terdapat dalam Rencana Pengelolaan (capaian hasil lebih rendah dari maksud dan tujuan yang direncanakan).
- Membuat strategi baru jika strategi pada Rencana Pengelolaan tidak terlihat hasilnya (maksud dan tujuan dalam Rencana Pengelolaan tidak tercapai)

## PENDEKATAN PENGELOLAAN DPL YANG EFEKTIF



Keberhasilan pengelolaan DPL didasarkan pada pencapaian maksud pengelolaan DPL (visi tentang apa yang kita inginkan dengan adanya DPL) dan tujuan (keadaan spesifik dan realistis untuk dicapai dalam periode waktu tertentu dimana hal ini dapat diukur dan divalidasi). Maksud dan tujuan pengelolaan DPL tercantum dalam Rencana Pengelolaan yang ada di setiap DPL. Tetapi kadang dalam suatu Rencana Pengelolaan terdapat banyak maksud dan tujuan sehingga kita perlu membuat pengkategorian indikator berdasarkan kelompok, yaitu :

1. **Biofisik** yang berhubungan dengan isu-isu fungsi dan manfaat ekologi DPL
2. **Sosial-ekonomi** yang berhubungan dengan isu-isu fungsi dan manfaat ekonomi DPL
3. **Kelembagaan** yang berhubungan dengan isu-isu fungsi dan manfaat sosial DPL

Indikator-indikator dari ketiga kelompok ini saling berhubungan dan saling mempengaruhi sehingga untuk menyusun strategi pengelolaan dan kegiatan yang dilakukan harus dilakukan secara terpadu. Keberhasilan dari strategi dan kegiatan sangat bergantung pada kesiapan dan partisipasi aktif dari masyarakat. Oleh karena itu penyiapan lembaga pengelola di masyarakat sangat penting. Lembaga pengelola itu dapat merupakan lembaga yang sudah ada maupun lembaga baru dibentuk, tergantung dari kemampuan lembaga itu dalam 3 hal;

1. Dapat melakukan koordinasi antar lembaga desa dan lembaga di luar desa
2. Dapat membentuk jaringan kerja
3. Kemampuan pendampingan untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara partisipatif

Pengalaman di lapangan bahwa ada lembaga pengelola yang memiliki kemampuan dalam pengelolaan DPL tetapi karena anggota-anggotanya tidak memperoleh pendapatan dari keanggotaannya itu sedangkan mereka harus mensejahterakan diri dan keluarganya maka akibatnya lembaga itu menjadi lemah.

Untuk mengatasi hal ini maka SCREEN sebagai lembaga yang banyak berhubungan dengan kelompok pengelola DPL telah membuat terobosan baru dengan memberikan bantuan kepada kelompok pengelola DPL di Blongko dan Serei masing-masing Rp.2.000.000 (US \$ 222.2 untuk kurs US \$ 1 = Rp. 9.000) sebagai modal bagi kelompok untuk usaha mikro kredit (usaha simpan pinjam). Disamping bantuan dana ini SCREEN juga memberikan pelatihan mengenai pengelolaan mikro kredit secara profesional sebagai bagian dari pengembangan dan penguatan

Kelompok Pengelola DPL di Blongko dan Serei. Efektifitas pengelolaan mikro kredit ini dapat dinilai satu tahun kemudian untuk mengetahui perkembangan modal kelompok, kesejahteraan anggota dan pengaruhnya pada keefektifan pengelolaan DPL.